IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN AKSEPTOR PRIA DI KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

Maryam^{1*}, Ahmad Junaidi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

*Corresponding Email : maryam.17071996@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program keluarga berencana dalam meningkatkan jumlah akseptor pria di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. implementasi perlu dilakukan sebagai media pemerintah maupun masyarakat agar jumlah partisipasi akseptor pria di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dapat meningkat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari hasil riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *wawancara, observasi dan dokumentasi dengan hasil* ; (1) kurangnya sosialisasi dari petugas pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat; (2) laki-laki sudah beranggapan bahwa yang melahirkan itu wanita jadi yang ber-KB juga wanita; (3) para pria juga takut untuk melakukan metode kontrasepsi secara operasi (MOP), sedangkan untuk kondom banyak pria yang malu untuk meminta jenis alat kontrasepsi kondom kepada petugas pelayanan KB. (4) banyaknya isu/ berita buruk yang telah tersebar dimasyarakat bahwa MOP dapat mengurangi performatitas hubungan suami istri.: Kualitas pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat.

Kata Kunci : kebijakan program, keluarga berencana, akseptor pria

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of family planning program policies in increasing the number of male acceptors in Kasui District, Way Kanan Regency. implementation needs to be done as a government and community media so that the number of male acceptors participation in Kasui District, Way Kanan Regency can increase. This study uses a qualitative approach obtained from the results of research that is descriptive and tends to use analysis. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation with the results; (1) lack of socialization from family planning program service officers to the community; (2) men already assume that it is a woman who gives birth, so women who take family planning are also women; (3) the men are also afraid to use the surgical method of contraception (MOP), while for condoms, many men are embarrassed to ask the family planning service officer for the type of contraception. (4) the number of bad news/issues that have been spread in the community that MOP can reduce the performance of husband and wife relationships: Quality of Public Service, Community Satisfaction.

Keywords: program policies, family planning, male acceptors

PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai penduduk cukup padat di dunia . Hal ini ditandai dengan populasi penduduk usia muda yang banyak di Indonesia. Tidak hanya itu presentase kelahiran di indonesia juga termasuk tinggi . hal ini yang menjadi dorongan Pemerintah untuk melakukan beberapa program untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk demi kebaikan. Salah satu program kependudukan yang sampai saat ini masih disosialisasikan Pemerintah Ke masyarakat yaitu program Keluarga Berencana Dengan slogan “Dua Anak Lebih Baik ” dan perkembangan jaman agar program berencana tetap melekat dalam masyarakat untuk itu sekarang berubah menjadi “Dua Anak Cukup”. Untuk itu pemerintah mengajak masyarakat untuk melaksanakan dan mewujudkan Program Keluarga Berencana dengan baik. Dengan melaksanakan program ini, tentu masyarakat sudah turut berkontribusi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan mencegah lonjakan yang semakin tinggi.

Program Keluarga Berencana ini dikelola secara khusus oleh suatu badan, kependudukan yaitu BKKBN. BKKBN

adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. dalam hal ini, BKKBN tentu mempunyai tugas dan wewenang yang yang dilakukan untuk mewujudkan program pemerintah dalam pengendalian penduduk. Dengan begitu, program dapat terstruktur dan terealisasikan dengan baik sehingga tujuan program keluarga berencana dapat dicapai menciptakan keluarga kecil yang berkualitas, sebab hidup yang baik diawali dengan perencanaan yang baik karena yang terencana akan lebih mudah.

Menurut (George Edwar Iii, 1980) Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Carl J Federick Sebagaimana dikutip (Pramudiana, 2017) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Pramudiana, 2017)

Menurut (Bahua, 2018) Partisipasi berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Beberapa bentuk dan tipe partisipasi yang diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi nyata (memiliki wujud) dan partisipasi tidak nyata (abstrak).

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga

yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dan sebagai perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya.

Komunikasi diartikan sebagai penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan publik menurut edwar III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Menurut (Larasati, 2018) mengemukakan bahwa sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Menurut (Larasati, 2018) disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Struktur Birokrasi menurut (Larasati, 2018) struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dan sebagainya. 2 karakteristik utama birokrasi, yakni : Standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berisikan riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus pada penelitian ini adalah pelayanan program keluarga berencana dalam meningkatkan akseptor pria di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dapat diterima dan dijalankan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang di inginkan.

Subyek sebagai sasaran pada penelitian ini merupakan Kepala UPT KB Kecamatan Kasui dan Penyuluh Keluarga Berencana dan masyarakat sebagai pasangan usia subur dan peserta KB aktif di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik triangulasi data,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kasui merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Secara administrasi Kecamatan Kasui terdiri dari 19 Kampung. Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 31.661 orang lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 31.529 orang. Menandakan bahwa masyarakat Kecamatan Kasui mengalami perkembangan jumlah penduduk dan ini akan berdampak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat kecamatan kasui. Dan hal ini menjadi target program keluarga berencana agar dapat menekan jumlah kelahiran ibu dan bayi di kecamatan kasui tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 0,2% dari jumlah pengguna alat kontrasepsi pria (Kondom) dan tidak mengalami peningatan MOP di Tahun 2020, untuk itu saya tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Kasui.

Keikutsertaan pria dalam program keluarga berencana bisa dilakukan dengan cara yaitu, sebagai peserta kb metode pencegahan kehamilan seperti :

kondom, vaksektomi (MOP), metode senggama terputus dan metode sistem kalender. Namun kepartisipasian pria dalam ber-kb di Kecamatan Kasui menjadi salah satu partisipasi pria dalam ber-KB rendah dibandingkan dengan Kecamatan lainya di Kabupaten Way Kanan. peran peserta KB pria khususnya vasektomi (MOP) 0% dan Kondom hanya 27 peserta KB Pria di Kecamatan Kasui sampai dengan desember 2020. Rendahnya pengguna kontrasepsi di kalangan pria dikarenakan persepsi pria bahwa program keluarga berencana hanya diperuntukan untuk wanita, sehingga pria cenderung pasif. Hal ini juga bisa dilihat dari penyediaan alat kontrasepsi yang hampir semuanya untuk wanita, sehingga pola pikir masyarakat mempunyai persepsi yakni yang hamil wanita dan yang melahirkan wanita maka yang ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi juga wanita. Kendala peningkatan peran serta ber-KB pria antara lain disebabkan oleh keengganan mereka ber-KB karna banyak yang berprinsip bahwa banyak anak banyak rezeki.

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran. Suatu model akan

memberikan gambaran kepada kita secara bulat dan lengkap mengenai suatu objek, situasi atau proses tersebut. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan terdiri atas : (1) Program (Kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target group atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (*Implementator*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya, dan politik).

Hal ini ini kembangkan oleh George Edwar III yang menyebutkan adapun faktor-faktor penentu keberhasilan implelementasi kebijakan diantara : (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan akseptor pria di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan tidak lain untuk meningkatkan akseptor KB khususnya akseptor pria di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan seperti Lampiran

I Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana bahwa pelayanan KB Harus dilaksanakan secara berkala baik untuk pertama kali pasang atau lepas pasang alat kontrasepsi. Hal ini diharapkan nantinya bisa memiliki pengaruh besar untuk perkembangan penduduk.

Kecamatan kasui merupakan lokasi yang dipilih untuk penelitian ini. dari hasil penelitian ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor UPT KB Kecamatan Kasui dan penelitian menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi akseptor pria di Kecamatan Kasui diantaranya : (1) kurangnya sosialisasi dari petugas pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat; (2) laki-laki sudah beranggapan bahwa yang melahirkan itu wanita jadi yang ber-KB juga wanita; (3) para pria juga takut untuk melakukan metode kontrasepsi secara operasi (MOP), sedangkan untuk kondom banyak pria yang malu untuk meminta jenis alat kontrasepsi kondom kepada petugas pelayanan KB. (4) banyaknya isu/ berita buruk yang telah tersebar dimasyarakat bahwa MOP dapat

mengurangi performalitas hubungan suami istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah partisipasi akseptor pria yang ada di Kecamatan Kasui Belum meningkat sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini terjadi karena persepsi masyarakat yang takut akan menjalankan metode alat kontrasepsi vasektomi baik itu dari masing-masing pribadi laki-laknya ataupun dari istri-istrinya. Sehingga untuk meningkatkan jumlah akseptor pria merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Tidak ada upaya khusus dari pemerintah hanya saja menjalankan kegiatan yang ada di program keluarga, namun hal ini tidak menjamin untuk bisa meningkatkan jumlah akseptor pria. Segala upaya telah dilakukan baik itu sosialisasi maupun lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran – saran yang kiranya dapat berguna kepada pihak – pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- George Edwar III. 1980. *implementasi publik policy*. Texas A&M University
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1),1-9.
- Larasati, S. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Deepublish.
- Bahua, M. I. (2018). Perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. *Gorontalo: Ideas Publishing*.
- Handayani, Sri. 2010. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Hartanto, Hanafi. 2010. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jayanti, S. (2017). *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradatu* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Sihabudin, B. (2017). Peran Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di CV. Triona Multi Industri. *Jurnal Kapemda*, 11(6), 95-113.
- Data kependudukan dan Informasi Keluarga Tahun 2019*. Aplikasi SIDUGA
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Program Berencana sebagai bentuk menahan pertumbuhan penduduk
- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.